

**LAPORAN SINGKAT
KOMISI IV DPR RI
(BIDANG PERTANIAN, LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN,
SERTA KELAUTAN)**

Tahun Sidang : 2023-2024
Masa Persidangan : I
Rapat ke- : 8
Jenis Rapat : Rapat Kerja dengan Menteri Kelautan dan Perikanan
Sifat Rapat : Terbuka
Hari/Tanggal : Kamis, 31 Agustus 2023
Waktu : 10.40 WIB s.d. Selesai
Tempat : Ruang Rapat Komisi IV DPR RI (KK IV)
Gedung Nusantara DPR RI, Senayan, Jakarta
Acara : Membahas:
1. Laporan Keuangan Pemerintah Pusat APBN TA. 2022;
2. RKA Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2024;
3. Usulan program-program yang akan didanai oleh DAK berdasarkan kriteria teknis dari Komisi; dan
4. Isu-isu aktual lainnya.
Ketua Rapat : Sudin, S.E. (Ketua Komisi IV DPR RI/F-PDIP) didampingi oleh Budhy Setiawan (Wakil Ketua Komisi IV DPR RI/F-PG) dan Dr. Hj. Anggia Erma Rini, M.K.M. (Wakil Ketua Komisi IV DPR RI/F-PKB)
Sekretaris Rapat : Drs. Achmad Agus Thomy (Kabag Set. Komisi IV DPR RI)
Hadir : A. 30 Anggota dari 54 Anggota Komisi IV DPR RI
B. Hadir Pemerintah:
1. Ir. Sakti Wahyu Trenggono, M.M. (Menteri Kelautan dan Perikanan);
2. Drs. Antam Novambar, S.H., M.Hum. (Sekretaris Jenderal);
3. Dr. TB. Haeru Rahayu, A.Pi., M.Sc. (Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya);
4. Laksda TNI Adin Nurawaluddin, M.Han. (Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan);
5. Dr. Budi Sulistiyo, M.Si. (Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan);

6. Drs. Victor Gustaaf Manoppo, M.H. (Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut);
7. Dr. I Nyoman Radiarta, S.Pi., M.Sc. (Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan);
8. Dr. Ir. Pamuji Lestari, M.Sc. (Kepala Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan);
9. Ir. Teuku Nilwan, M.M. (Plt. Inspektur Jenderal);
10. Dr. Agus Suherman, S.Pi., M.Si. (Plt. Direktur Jenderal Perikanan Tangkap);
11. Frans Marganda Tambunan (Direktur Utama PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero)/Holding Pangan *ID FOOD*);
12. Sigit Muhartono (Direktur Utama PT Perikanan Indonesia); dan
13. Arif Haendra (Direktur Utama PT Garam (Persero)).

I. PENDAHULUAN

Rapat Kerja Komisi IV DPR RI dengan Menteri Kelautan dan Perikanan, membahas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat APBN TA. 2022, RKA Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2024, Usulan program-program yang akan didanai oleh DAK berdasarkan kriteria teknis dari Komisi, dan Isu-isu aktual lainnya, dibuka pukul 10.40 WIB oleh Ketua Rapat, Sudin, S.E. (Ketua Komisi IV DPR RI/F-PDIP) dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.

II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN:

1. Komisi IV DPR RI mengapresiasi capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) serta menerima penjelasan Menteri Kelautan dan Perikanan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun Anggaran 2022 per-31 Desember 2022 sesuai Laporan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI), dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Realisasi Pendapatan Negara bersih berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp1.871.111.943.645,00 (satu triliun delapan ratus tujuh puluh satu miliar seratus sebelas juta sembilan ratus empat puluh tiga ribu enam ratus empat puluh lima rupiah) atau mencapai 98,16% dari estimasi Pendapatan – LRA sebesar Rp1.906.162.968.000,00 (satu triliun sembilan ratus enam miliar seratus enam puluh dua juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu rupiah).
 - b. Realisasi Belanja Negara bersih sebesar Rp5.397.787.396.056,00 (lima triliun tiga ratus sembilan puluh tujuh miliar tujuh ratus delapan puluh tujuh juta tiga ratus sembilan puluh enam ribu lima puluh enam rupiah) atau mencapai 98,70% dari alokasi anggaran sebesar

Rp5.468.879.184.000,00 (lima triliun empat ratus enam puluh delapan miliar delapan ratus tujuh puluh sembilan juta seratus delapan puluh empat ribu rupiah).

2. Komisi IV DPR RI mendengarkan penjelasan Menteri Kelautan dan Perikanan mengenai Pagu Anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam RKA K/L Tahun 2024 berdasarkan Surat Bersama Menteri Keuangan dan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor S-626/MK.02/2023 dan Nomor B.644/M.PPN/D.8/PP.04.02/07/2023 tanggal 31 Juli 2023 hal Pagu Anggaran Belanja Kementerian/Lembaga dan Dana Alokasi Khusus TA 2024 dan Penyelesaian Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga, sebesar Rp7.046.659.869.000,00 (tujuh triliun empat puluh enam miliar enam ratus lima puluh sembilan juta delapan ratus enam puluh sembilan ribu rupiah). Selanjutnya Komisi IV DPR RI akan membahas lebih mendalam bersama Eselon I Kementerian Kelautan dan Perikanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Komisi IV DPR RI mendengarkan penjelasan Menteri Kelautan dan Perikanan mengenai Pagu Anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Bidang Kelautan dan Perikanan Tahun Anggaran 2024, sebesar Rp1.309.900.000.000,00 (satu triliun tiga ratus sembilan miliar sembilan ratus juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Provinsi, sebesar Rp489.128.443.307,00 (empat ratus delapan puluh sembilan miliar seratus dua puluh delapan juta empat ratus empat puluh tiga ribu tiga ratus tujuh rupiah); dan
 - b. Kabupaten/Kota, sebesar Rp820.771.556.693,00 (delapan ratus dua puluh miliar tujuh ratus tujuh puluh satu juta lima ratus lima puluh enam ribu enam ratus sembilan puluh tiga rupiah).
4. Komisi IV DPR RI mendukung rancangan usulan tambahan anggaran pagu anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun 2024 sebesar Rp986.400.000.000,00 (sembilan ratus delapan puluh enam miliar empat ratus juta rupiah), sehingga total usulan pagu alokasi anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun 2024 sebesar Rp8.033.059.869.000,00 (delapan triliun tiga puluh tiga miliar lima puluh sembilan juta delapan ratus enam puluh sembilan ribu rupiah).
5. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk berkomitmen menjalankan program dan kegiatan secara baik, tepat sasaran dan terukur, serta akuntabel, khususnya yang berhubungan dengan kegiatan prioritas dan kegiatan yang bersifat bantuan pemerintah untuk masyarakat kelautan perikanan.
6. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk menindaklanjuti hasil kunjungan kerja Komisi IV DPR RI dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan dan menyerap aspirasi rakyat.

7. Komisi IV DPR RI mendorong Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk menumbuhkan budi daya lobster dalam negeri sebagai solusi atas kebijakan pelarangan ekspor benih lobster ke luar negeri untuk kesejahteraan masyarakat kelautan perikanan.
8. Komisi IV DPR RI mendorong Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk berkomitmen merealisasikan program dan kegiatan di Provinsi Maluku dan Maluku Utara sebagai Lumbung Ikan Nasional (MLIN).
9. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat batas akhir penyerahan Calon Penerima Calon Lokasi (CPCL), seperti bantuan bioflok dan bantuan lainnya di setiap Eselon I teknis, paling lambat tanggal 5 September 2023. Selanjutnya Komisi IV DPR RI akan melakukan Rapat Dengar Pendapat terkait hal tersebut, khususnya mengenai capaian realisasi anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan di bawah 60% untuk direalokasi kepada kegiatan lainnya.

III. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 13.10 WIB.

Menteri Kelautan dan Perikanan,

Ttd.

Ir. Sakti Wahyu Trenggono, M.M.

Komisi IV DPR RI
Ketua Rapat,

Ttd.

Sudin, S.E.
A-151